

**Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran
Anggaran Belanja Modal, Dan Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Otonomi Daerah
(Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2008)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Rezka Prakarsa Ardani

0513010241/FE/EA

Kepada

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2009**

**Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran
Anggaran Belanja Modal, Dan Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Otonomi Daerah
(Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2008)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi**



Diajukan Oleh:

Rezka Prakarsa Ardani
0513010241/FE/EA

Kepada

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2009**

SKRIPSI

**Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran
Anggaran Belanja Modal, Dan Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Otonomi Daerah
(Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2008)**

Disusun Oleh:

Rezka Prakarsa Ardani
0513010241/FE/EA

**telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 21 Mei 2010**

**Pembimbing :
Pembimbing Utama**

**Tim Penguji :
Ketua**

Dra. Ec. Diah Hari Suryaningrum, M.Si., Ak

Dra. Ec. Hj. Sri Hastuti, M.Si
Sekretaris

Dra. Ec. Siti Sundari, M.Si
Anggota

Dra. Ec. Diah Hari Suryaningrum, M.Si., Ak

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur Dekan Fakultas Ekonomi**

Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, SE., MM
NIP. 030 202 389

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kenikmatan serta karunia-Nya yang tak terhingga sehingga saya berkesempatan menimba ilmu hingga jenjang Perguruan Tinggi. Berkat rahmat dan karunia-Nya pula saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Anggaran Belanja Modal, dan Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2008)”**.

Sebagaimana diketahui bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE). Walaupun dalam penulisan skripsi ini penulis telah memcurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran dan bantuan maupun dorongan dari beberapa pihak maka skripsi ini tidak akan mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bapak Dr. Dhani Ichsanudin Nur, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dr. Sri Trisnaningsih, M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dra. Ec. Diah Hari Suryaningrum, M.Si., Ak, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan waktu luangnya di tengah kesibukan beliau untuk mengoreksi kesalahan dalam pengerjaan skripsi ini secara teliti dan kritis demi kesempurnaannya.
5. Kepada dosen-dosenku yang berkecimpung di dunia perakuntansian pada umumnya, dan di bidang sektor publik/pemerintah pada khususnya yang telah memberikan ilmu-ilmunya dari pengalamannya. *Thanks a lot for everything.*
6. Ibuku, yang selalu setia mengingatkanku untuk cepat-cepat selesaikan skripsinya dan telah banyak memberikan banyak dorongan, semangat serta doa restu, baik secara moril maupun materil yang aku tak mungkin bisa membalasnya, semoga ALLAH membalas semua kebaikan ibu berikan. Amin.
7. Untuk pakdeku yang baru meninggal (alm) Prof. Dr. Dibyo Prabowo, M.Sc (Guru Besar UGM), Bude Mina, Mas Joel, Mbak Tina. Terima kasih atas doanya dan bantuannya untuk mencari buku referensi skripsiku di UGM.

8. Segenap staf pengajar, karyawan dan seluruh rekan-rekan mahasiswa terutama Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Serta untuk semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang ikut membantu, baik langsung maupun tidak langsung, dalam rangka penyusunan skripsiku ini. Terima kasih.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas semua kebaikan dan selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kalian semua. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun demikian saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis demi kesempurnaannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	14
2.2. Landasan Teori	24
2.2.1. Pengertian Otonomi Daerah dan Desentralisasi	24
2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi (<i>Growth Economic</i>).....	26
2.2.2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	26
2.2.2.2. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi	27
2.2.2.3. Ciri Pertumbuhan Ekonomi.....	29
2.2.2.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi	30
2.2.2.5. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi	35
2.2.2.6. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	36
2.2.2.7. Pendekatan Perhitungan PDRB.....	38
2.2.2.8. Kegunaan Statistik PDRB	39

2.2.3. Pengertian Anggaran (<i>Budgeting</i>)	40
2.2.4. Anggaran Pendapatan (<i>Revenue Budgeting</i>).....	42
2.2.4.1. Pengertian Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah	42
2.2.4.2. Struktur Pendapatan Asli Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah	43
2.2.5. Anggaran Belanja (<i>Expenditure Budgeting</i>).....	54
2.2.5.1. Pengertian Anggaran Belanja Daerah	54
2.2.5.2. Komponen Anggaran Belanja Daerah.....	55
2.2.6. Pengertian Anggaran Belanja Modal	56
2.2.7. Pengertian Anggaran Belanja Rutin	57
2.2.8. Pengaruh Relisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	58
2.2.9. Pengaruh Pengeluaran Anggaran Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	61
2.2.10. Pengaruh Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	64
2.3. Kerangka Pikir	65
2.4. Hipotesis (<i>Hypothesis</i>)	66

BAB III: METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	68
3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi (Y)	68
3.1.2. Pendapatan Asli Daerah (X_1)	69
3.1.3. Pengeluaran Anggaran Belanja Modal (X_2)	69
3.1.4. Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin (X_3)	69
3.2. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel	70
3.2.1. Populasi	70
3.2.2. Sampel	70
3.3. Teknik Pengumpulan Data	71
3.3.1. Jenis Data	71

3.3.2. Sumber Data	72
3.4. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis	72
3.4.1. Teknik Analisis	72
3.4.2. Uji Normalitas	73
3.4.3. Uji Asumsi Klasik	73
3.4.4. Uji Hipotesis	77
3.4.4.1. Uji-t.....	77
3.4.4.2. Uji-F.....	78

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.....	Has
il Deskripsi Penelitian.....	80
4.1.1.....	G
ambaran Umum Kabupaten/Kota Dalam Objek Penelitian.	80
4.2.....	Des
kripsi Hasil Penelitian.....	113
4.2.1.....	Des
kripsi Hasil Uji Kualitas Data Penelitian	113
4.2.2.....	Pert
umbuhan Ekonomi (Y).....	114
4.2.3.....	Pen
dapatan Asli Daerah (X_1)	116
4.2.4.....	Ang
garan Belanja Modal (X_2)	117
4.2.5.....	Ang
garan Belanja Rutin (X_3).....	118
4.3.....	Tek
nik Analisis dan Uji Hipotesis	120
4.3.1.....	Tek
nik Analisis.....	120

4.3.2.....	Uji	
Normalitas		121
4.3.3.....	Uji	
Asumsi Klasik		122
4.3.4.....	Uji	
Hipotesis.....		125
4.3.4.1.....	Uji-	
F.....		125
4.3.4.2.....	Uji-	
t.....		128
4.4.....	Pem	
bahasan Hasil Penelitian		132
4.5.....	Imp	
likasi Penelitian.....		132
4.5.1.....	P	
perbedaan Hasil Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu .		147
4.5.2.....	Ket	
erbatasan Penelitian.....		149
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1.....	Kes	
impulan		150
5.2.....	Sara	
n		150

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Belanja Rutin, Anggaran Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2008	7
Tabel 4.1	Hasil Uji Kualitas Data (Uji <i>Outlier</i>)	114
Tabel 4.2	Analisis Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2008	115
Tabel 4.3	Analisis Deskripsi Penerimaan Asli Daerah (X_1) Kab/Kota di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2008	116
Tabel 4.4	Analisis Deskripsi Anggaran Belanja Modal (X_2) Kab/Kota di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2008	117
Tabel 4.5	Analisis Deskripsi Anggaran Belanja Modal (X_2) Kab/Kota di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2008	119
Tabel 4.6	Model Regresi	120
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas	121
Tabel 4.8	Hasil Uji Autokorelasi (Uji Durbin-Watson)	122
Tabel 4.9	Nilai VIF (<i>Variance Inflation Factor</i>)	124
Tabel 4.10	Hasil Korelasi <i>Rank Spearman</i>	125
Tabel 4.11	Hasil Uji-F	126
Tabel 4.12	Hasil Uji-t	129
Tabel 4.13	Hasil Uji Korelasi	146
Tabel 4.14	Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Terdahulu	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Kerangka Pikir	66
-------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rekapitulasi Pertumbuhan Ekonomi (Y)
- Lampiran 2 : Rekapitulasi Penerimaan Asli Daerah (X_1)
- Lampiran 3 : Rekapitulasi Anggaran Belanja Modal (X_2)
- Lampiran 4 : Rekapitulasi Anggaran Belanja Rutin (X_3)
- Lampiran 5 : Analisis Deskriptif Pertumbuhan Ekonomi (Y)
- Lampiran 6 : Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (X_1)
- Lampiran 7 : Analisis Deskriptif Anggaran Belanja Modal (X_2)
- Lampiran 8 : Analisis Deskriptif Anggaran Belanja Rutin (X_3)
- Lampiran 9 : Uji Kualitas Data (Uji *Outlier*)
- Lampiran 10 : Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 12 : Hasil Uji Autokorelasi (Uji Durbin-Watson)
- Lampiran 12 : Hasil Uji Multikolinieritas
- Lampiran 13 : Hasil Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 14 : Hasil Uji Hipotesis
- Lampiran 15 : Tabel Uji-F
- Lampiran 16 : Tabel Uji-t

**Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Anggaran Belanja Modal, Dan Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Otonomi Daerah
(Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2008)**

**Oleh :
Rezka Prakarsa Ardani**

ABSTRAKSI

Semenjak dorongan reformasi birokrasi yang digulirkan pada tahun 1999, telah mendekonstruksi sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi. Semangat reformasi birokrasi mencapai puncaknya pada tanggal 1 Januari 2001, yaitu sebagai tonggak awal pelaksanaan Otonomi Daerah yang merupakan konsekuensi logis dari asas desentralisasi. Kondisi tersebut merupakan babak baru bagi Negara Indonesia dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara yang berorientasikan pada pencapaian kinerja dengan memfokuskan pada *output* dan *outcome*. Tujuan otonomi daerah adalah diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, dan percepatan pertumbuhan ekonomi serta kemadirian yang merupakan implementasi dari *output* dan *outcome* (Mardiasmo, 2002: 59, Bastian, 2006: 354). Segala kegiatan pemerintah dalam ruang lingkup Otonomi Daerah dibiayai oleh APBD. Penelitian ini dilakukan bermaksud untuk melihat sejauh mana efek pelaksanaan otonomi daerah yang dibiayai APBD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Objek penelitian ini adalah data-data keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur dari tahun 2001-2008, yang datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data-data keuangan yang diteliti meliputi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Anggaran Belanja Modal, Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian secara simultan untuk Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Anggaran Belanja Modal, Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan secara parsial menunjukkan hanya Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin yang berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Pengeluaran Anggaran Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Keywords: Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Anggaran Belanja Modal, Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin, Pertumbuhan Ekonomi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan salah satu Ketetapan MPR yaitu TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “*Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diubah dengan Peraturan Perubahan Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Mardiasmo, 2002: 24), yang notabene kedua undang-undang tersebut adalah sebagai payung hukum pelaksanaan dan tonggak awal diselenggarakannya otonomi daerah (Bastian, 2006: 2), yang secara formal resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001 (Saragih, 2003: 29; Kuncoro, 2004: 18).

Menurut Mardiasmo (2002: 59), tujuan utama pelaksanaan dan pemberlakuan undang-undang otonomi daerah adalah diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Sedangkan menurut Bastian (2006: 354) menyatakan bahwa

tujuan program otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antardaerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (*public service*) agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Yuliati (2001: 16) menyatakan bahwa dalam usaha mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan modal untuk digunakan pada kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat sebagai usaha pemerintah menggerakkan sektor perekonomian. Pendapat tersebut didukung Malthus, yaitu untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus-menerus (Irawan dan Suparmoko, 2002: 27).

Selain itu, berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi Kaum Klasik yang beranggapan bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bersumber utama dari modal (Suryana, 2000: 59). Sependapat dengan teori pertumbuhan ekonomi Ekonom Kaum Klasik, Walt Whitman Rostow dalam bukunya "*The Stages of Economic*" (1960) mengemukakan teori 5 tahapan proses pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan tentang runtutan alur proses pertumbuhan atau pembangunan ekonomi suatu negara, yang disalah satu tahapannya yaitu untuk mencapai tahap lepas landas (*take off*) adalah berlakunya kenaikan laju investasi/penanaman modal yang produktif kurang lebih 5-10% dari pendapatan nasional atau produk nasional netto (Jhingan, 1990: 182;

Suryana, 2000: 62). Investasi di sektor produktif adalah semua jenis investasi atau penanaman modal yang menambah sumberdaya-sumberdaya baru yang nantinya akan meningkatkan stok modal suatu negara sehingga pada gilirannya nanti akan meningkatkan tingkat *output* dan pendapatan nasional (Arsyad, 2004: 214-215). Selain itu, teori model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar tentang Teori Pertumbuhan Mantap (*steady growth theory*) yang merupakan pengembangan analisis Keynes lebih menekankan atau memberikan peranan kunci tentang perlunya penanaman modal dalam proses penciptaan pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 1990: 291; Suryana, 2000: 66).

Modal atau *capital* sebagai faktor produksi pada pembangunan ekonomi bukan dalam bentuk uang (*money*) tetapi *real capital* atau *capital goods* (barang-barang modal). Penanaman/penambahan modal terhadap persediaan barang modal biasanya disebut investasi (Kamaluddin, 1996: 71-72). Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2005) investasi dalam kerangka pemerintah didefinisikan sebagai belanja modal/pembangunan yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Pengertian tersebut ditekankan pada penggunaan asset untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat/publik. Padahal suatu asset di pemerintah (pusat atau daerah), khususnya asset tetap seperti dalam bentuk tanah, bangunan, infrastruktur sarana dan prasarana publik, dan asset tetap lainnya yang diperoleh melalui proses pengeluaran dana yang disebut Belanja Modal (Halim dan

Subiyanto, 2008: 4-5). Sehingga penginvestasian pemerintah yang berasal dari belanja modal berdasarkan dari tahun ke tahun akan berakumulasi menjadi akumulasi modal yang merupakan keharusan bagi pembangunan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang sedang berkembang untuk menjadi negara yang lebih maju, sehingga semakin besar modal yang tersedia maka akan mempercepat pembangunan ekonomi (Suryana, 2000: 72).

Teori pertumbuhan ekonomi tersebut secara otomatis berkaitan erat dengan teori pengeluaran pemerintah dalam kerangka otonomi daerah. Menurut model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan Walt Whitman Rostow dengan menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah seiring tahap-tahap pembangunan ekonomi yang pada tahap awal perkembangan ekonomi, pemerintah akan membutuhkan investasi yang besar atau yang lebih dikenal dengan Teori Dorongan Kuat (*big push theory*) (Mangkoesebroto, 1993: 170). Sedangkan Musgrave berpendapat bahwa pada awal pertumbuhan ekonomi diharapkan pengeluaran pemerintah untuk barang modal harus lebih besar sebagai pemberian fasilitas sarana dan prasarana publik untuk pengembangan investasi dari sektor swasta, yang demikian diharapkan bahwa peranan pemerintah dalam pembentukan modal akan menurun setelah berlangsungnya proses pertumbuhan ekonomi (Mangkoesebroto, 1993: 170). Sedangkan teori pengeluaran yang dikemukakan oleh Adolf Wagner menyatakan bahwa

pengeluaran dan kegiatan pemerintah yang semakin meningkat telah lama dirasakan, tendensi makin meningkatnya pengeluaran pemerintah oleh Wagner dinamakan “*Gesetz der wachsenden Ausdehnung den Staatstätigkeiten*” atau hukum selalu makin meningkatnya kegiatan-kegiatan negara (*law of ever increasing state activities*). Sehingga hukum Wagner tersebut oleh R.A. Musgrave disebut hukum “*growing public expenditure*” atau hukum makin meningkatnya pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Soetrisno, 1984: 364). Peningkatan kegiatan pemerintah difokuskan untuk membangun infrastruktur sarana dan prasarana dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, tujuan otonomi diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan teori hukum Wagner bahwa pengeluaran pemerintah akan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan pemerintah dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pelayanan publik yang merupakan salah satu pelaksanaan tujuan otonomi daerah yang diimplementasikan pada pengeluaran belanja rutin (Soetrisno, 1984: 364). Pengeluaran belanja rutin diidentikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan yang ada setiap tahun (Mardiasmo, 2002: 66). Pendapat tersebut didukung teori oleh Walt Whitman Rostow tentang pengeluaran pemerintah yang didasarkan pada tahap-tahap pertumbuhan ekonomi dan hukum Wagner yang

menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah semakin meningkat berdasarkan kegiatannya dalam menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan publik untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah (Mangkoesobroto, 1993: 170; Soetrisno, 1984: 364).

Selain itu, tujuan utama penerapan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Mardiasmo, 2002: 59; Bastian, 2002: 354). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dengan kata lain adanya peningkatan PAD merupakan eksese dari pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan diyakini antara PAD dan pertumbuhan ekonomi terdapat adanya korelasi (Saragih, 2003: 55-58). Pendapat tersebut didukung Teori Peacock dan Wiseman yang mengemukakan suatu teori *“bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah akan memberikan dampak pada meningkatnya penerimaan pajak sehingga menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar pula”* (Mangkoesobroto, 1993: 173).

Namun keterkaitan antara teori dengan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Modal dengan laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota

di Jawa Timur mengindikasikan adanya perbedaan. Salah satu contohnya, pada Tabel.1 untuk Kabupaten Malang pada tahun 2002 Realisasi Anggaran PAD mengalami peningkatan dari Rp 26.701.090 menjadi Rp 34.069.212 tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi yang justru menurun dari 4,35% menjadi 3,84%.

Sedangkan pada tahun 2003 Realisasi Anggaran PAD menjadi Rp 53.566.115, kenaikan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya

Tabel 1.1: Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Belanja Rutin, Anggaran Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2008

No.	Kota/Kabupaten	Tahun	Penerimaan Asli Daerah	Realisasi Anggaran Belanja Rutin	Realisasi Anggaran Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi
			dalam ribu rupiah	dalam ribu rupiah	dalam ribu rupiah	dalam persen
1	Kab.Malang	2001	Rp 26.701.090	Rp 372.894.468	Rp 88.336.936	4,35
		2002	Rp 34.069.212	Rp 356.490.465	Rp 150.765.674	3,84
		2003	Rp 53.566.115	Rp 477.859.252	Rp 148.788.124	3,97
		2004	Rp 43.504.733	Rp 588.439.462	Rp 58.139.535	5,64
		2005	Rp 54.245.450	Rp 603.537.377	Rp 42.878.708	5,05
		2006	Rp 69.651.783	Rp 685.500.781	Rp 222.574.984	5,33
		2007	Rp 60.574.671	Rp 846.661.787	Rp 265.831.521	6,06
		2008	Rp 100.327.728	Rp 1.006.041.233	Rp 331.809.508	5,79
2	Kota Kediri	2001	Rp 13.704.520	Rp 101.528.706	Rp 26.909.263	5,98
		2002	Rp 21.246.977	Rp 127.364.744	Rp 61.384.556	-2,49
		2003	Rp 26.209.849	Rp 154.303.811	Rp 63.650.827	3,86
		2004	Rp 29.378.105	Rp 165.171.754	Rp 40.681.420	6,01
		2005	Rp 40.135.035	Rp 211.657.266	Rp 29.482.721	1,58
		2006	Rp 52.905.244	Rp 274.745.543	Rp 92.060.972	3,82
		2007	Rp 54.473.977	Rp 352.445.426	Rp 179.138.568	4,35
		2008	Rp 66.050.000	Rp 425.794.000	Rp 120.221.000	4,82
3	Kota Surabaya	2001	Rp 208.238.135	Rp 545.924.044	Rp 81.563.010	4,25
		2002	Rp 277.863.171	Rp 668.358.451	Rp 247.917.304	3,81
		2003	Rp 348.310.014	Rp 699.292.159	Rp 376.081.925	4,23
		2004	Rp 327.554.638	Rp 1.128.707.272	Rp 190.574.850	6,80
		2005	Rp 495.189.721	Rp 1.119.419.174	Rp 172.970.110	7,32
		2006	Rp 538.369.935	Rp 990.845.270	Rp 395.495.696	6,81
		2007	Rp 583.483.623	Rp 1.778.973.126	Rp 727.778.192	6,83
		2008	Rp 767.659.692	Rp 1.910.722.949	Rp 857.930.714	6,07

Sumber: Badan Pusat Statistik

pertumbuhan ekonomi namun tidak begitu signifikan yang hanya naik sebesar 0,13% dari 3,84 % menjadi 3,97%. Ketika pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi naik sangat signifikan dan melonjak tajam sebesar 1,67% dari 3,97% menjadi 5,64%, namun PAD justru mengalami penurunan dari Rp 53.566.115 menjadi Rp 43.504.733. Selain itu, pada tahun 2008 Kabupaten Malang mengalami peningkatan PAD secara drastis dari Rp 60.574.671 menjadi Rp 100.327.728, namun keadaan tersebut berbanding terbalik yang mana pertumbuhan ekonomi justru merosot sebesar 0,27% dari 6,06% menjadi 5,79%. Bahkan ketika awal pelaksanaan otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri merosot tajam yang mana ketika tahun 2001 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98% pada tahun 2002 turun sangat tajam menjadi minus (-) 2,49%, sebaliknya PAD mengalami kenaikan dari Rp 13.704.520 menjadi Rp 21.246.977. Kondisi serupa juga dialami Ibu Kota Jawa Timur ketika awal pelaksanaan otonomi daerah, yaitu pada tahun 2002 Penerimaan Asli Daerah mengalami peningkatan dari Rp 208.238.135 menjadi Rp 277.863.171, namun pertumbuhan ekonomi justru mengalami penurunan yang awalnya 4,25% pada tahun 2002 menjadi 3,81% dan pada tahun 2008 Realisasi Anggaran PAD Kota Surabaya mengalami peningkatan dari Rp 583.483.623 menjadi Rp 767.659.692, namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang malah mengalami penurunan dari 6,83% menjadi 6,07%. Keadaan tersebut tidak jauh beda juga dialami Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk realisasi

anggaran belanja rutin dan belanja modal. Contohnya, pada Tabel.1 untuk Kabupaten Malang pada tahun 2002, Realisasi Anggaran Belanja Modal mengalami peningkatan secara tajam dari Rp 88.336.936 menjadi Rp 150.765.674 tetapi pertumbuhan ekonomi justru menurun dari 4,35% menjadi 3,84%. Bahkan penerimaan PAD mengalami penurunan secara beruntun dari Rp 150.765.674 menjadi Rp 148.788.124 di tahun 2003, lalu dari Rp 148.788.124 menjadi Rp 58.139.535 di tahun 2004. Namun pertumbuhan ekonomi justru mengalami peningkatan pada tahun 2003 dari 3,84% menjadi 3,97 dan pada tahun 2004 dari 3,97% menjadi 5,64%. Sedangkan realisasi anggaran belanja rutin pada tahun 2002 mengalami peningkatan dari Rp 372.894.468 menjadi Rp 356.490.465 tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang malah menurun dari 4,35% menjadi 3,84%. Bahkan untuk Realisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2008 mengalami peningkatan secara drastis dari Rp 846.661.787 menjadi Rp 1.006.041.233, namun pertumbuhan ekonomi justru menurun dari 6,06% menjadi 5,79%.

Lalu pada Kota Kediri, di awal pelaksanaan otonomi daerah pertumbuhan ekonomi juga mengalami kondisi serupa, bahkan pertumbuhannya terjun bebas berada pada *level* minus (-) yang semula pada tahun 2001 5,98% menjadi -2,49% pada tahun 2002. Namun pada tahun 2002 Realisasi Anggaran Belanja Modal dan Anggaran Belanja Rutin justru mengalami peningkatan secara signifikan dari Rp

26.909.263 menjadi Rp 61.384.556 dan Rp 101.528.706 menjadi Rp 127.364.744. Pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi naik secara drastis sebesar 2,15% yang pada tahun 2003 3,86% menjadi 6,01% pada tahun 2004, tetapi Realisasi Anggaran Belanja Modal malah menurun dari Rp 63.650.827 menjadi Rp 40.681.420. Sedangkan tahun 2005 pertumbuhan ekonomi turun tajam sebesar 4,43% dari 6,01 menjadi 1,58% dan kondisi ini juga sama dengan Realisasi Anggaran Belanja Modal yang turun dari Rp 40.681.420 menjadi Rp 29.482.721, tetapi sebaliknya Realisasi Anggaran Belanja Rutin justru mengalami kenaikan sebesar Rp 46.855.512 dari Rp 165.171.754 menjadi Rp 211.657.266.

Keadaan pada beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur juga dialami Kota Surabaya yang diawal pelaksanaan otonomi daerah. Pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi menurun dari 4,25% menjadi 3,81%, namun untuk Realisasi Anggaran Belanja Modal justru mengalami kenaikan dari Rp 81.563.010 menjadi Rp 247.917.302 dan untuk Anggaran Belanja Rutin dari Rp 545.924.044 Rp 668.358.451. Terakhir, pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi menurun dari 6,83% menjadi 6,07%, tetapi kondisi ini berbanding terbalik malah Realisasi Anggaran Belanja Modal dan Anggaran Belanja Rutin mengalami peningkatan dari Rp 727.778.192 menjadi Rp 857.930.714 dan Rp 1.778.973.126 menjadi Rp 1.910.722.949.

Adanya kesenjangan (*gap*) yang terjadi antara teori dengan realisasi anggaran pendapatan asli daerah, pengeluaran anggaran belanja modal

dan belanja rutin terhadap pertumbuhan ekonomi pada kasus/fenomena yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta masih jarang nya penelitian yang menganalisis pengaruh pengeluaran anggaran belanja rutin, karena sudah bukan rahasia umum bahwa besarnya pengeluaran anggaran belanja rutin memunculkan jargon “*pemerintah merupakan sumber tempat pemborosan*” yang ironisnya pengeluaran anggaran lebih banyak dialokasikan pada belanja rutin yang dinilai kurang produktif disebabkan tidak memiliki nilai tambah untuk menambah kekayaan/asset pemerintah berupa asset tetap, bangunan, gedung, jalan, infrasturktur dan lain-lain serta, menurut teori pertumbuhan ekonomi, seyogyanya pemerintah lebih meningkatkan pembangunan ekonomi dalam rangka untuk mencapai tahap tinggal landas yang menurut Rostow dinilai berdasarkan laju pembangunan/pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Anggaran Belanja Modal, dan Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2001-2008)*”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dikemukakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut

dengan menggunakan metode penelitian studi kasus adalah untuk mengetahui apakah realisasi anggaran pendapatan asli daerah, pengeluaran anggaran belanja modal, dan pengeluaran anggaran belanja rutin berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di era Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2001-2008”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh realisasi anggaran pendapatan asli daerah, pengeluaran anggaran belanja modal, dan pengeluaran anggaran belanja rutin terhadap pertumbuhan ekonomi di Era Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2001-2008”.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan berbagai manfaat untuk beberapa pihak sebagai berikut :

a. Peneliti.

Untuk memperdalam keilmuan di bidang sektor publik, baik akuntansi/keuangan pemerintah maupun organisasi nirlaba.

b. Universitas.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga sebagai Dharma Bhakti perguruan tinggi Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada umumnya dan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada khususnya untuk konsentrasi Sektor Publik sebagai tambahan perbendaharaan referensi dan mungkin dapat memberikan ide atau inspirasi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut bagi rekan-rekan yang mungkin mengadakan penelitian di bidang yang sama berkaitan dengan tujuan penelitian dimasa yang akan datang.

c. Peneliti selanjutnya.

Memberikan kontribusi atau referensi tambahan sebagai khazanah ilmu pengetahuan untuk penelitian di bidang akuntansi sektor publik/keuangan daerah serta pengukuran kinerja pemerintah.

d. Pemerintah.

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bukti empiris keterkaitan tentang realisasi anggaran pendapatan asli daerah, pengeluaran anggaran belanja modal dan pengeluaran anggaran belanja rutin berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.